

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis saat ini, bisnis berkembang dengan sangat pesat sehingga menuntut agar perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif, terutama perusahaan yang sudah go publik. Perusahaan merupakan tempat usaha dalam bentuk organisasi yang dioperasikan untuk tujuan menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat untuk memperoleh laba atau keuntungan. Laba merupakan indikator yang umum digunakan dalam menilai kinerja perusahaan serta dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, serta menjadi perhatian bagi para stakeholder. Laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal pada suatu perusahaan karena laba merupakan hasil dari pendapatan dikurang biaya. Laba yang tinggi akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Oleh karena itu untuk mendapatkan penilaian yang baik, maka kecenderungan untuk melakukan manajemen laba akan semakin besar.

Salah satu kasus manajemen laba yang terjadi yaitu kasus PT Kimia Farma. Dimana dalam kasus ini informasi laba yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. PT Kimia Farma merupakan perusahaan manufaktur industri farmasi terbesar, melaporkan laba bersih sebesar Rp 132 milyar pada tanggal 31 Desember 2001 yang seharusnya hanya sebesar Rp 99 milyar. Menurut Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa perusahaan melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, berupa kesalahan perhitungan

matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi dan kesalahan interpretasi fakta dan kelalaian. Kasus-kasus tentang praktik Manajemen Laba yang dilakukan oleh perusahaan telah banyak terjadi dan masih banyak kasus yang belum terungkap ke publik, namun kasus yang telah terungkap salah satunya yaitu PT. Kimia Farma tersebut di atas. Berkaitan dengan hal tersebut maka saya tertarik untuk meneliti tentang Manajemen Laba.

Pemisahan antara pemilik (*principal*) dan kepentingan manajemen (*agent*) memiliki sisi yang negatif, dimana keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses memaksimalkan keuntungan manajer sendiri dengan biaya yang akan ditanggung oleh pemilik perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan banyak mengetahui informasi internal serta prospek perusahaan di masa depan daripada pemilik perusahaan. Konflik kepentingan ini semakin meningkat, terutama karena *principal* tidak memiliki informasi tentang kegiatan manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen tersebut sejalan dengan keinginan pemilik.

Menurut Schipper dalam Senja & Annisa (2019) menyatakan bahwa “Manajemen Laba merupakan kegiatan dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal, untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pihak yang tidak setuju, mengatakan ini hanya upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses”. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan wewenang mereka untuk mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan menyesatkan pemangku kepentingan tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan

laporan keuangan menggunakan dasar akrual, dasar akrual ini mempunyai implikasi bahwa laba akuntansi antara lain ditentukan oleh besaran akrual baik *discretionary* maupun *nondiscretionary*. Dampak negatif yang timbul dalam pengelolaan manajemen laba yang tidak baik yaitu berkurangnya kredibilitas dan validitas informasi keuangan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. *Discretionary Accrual* merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, dimana cara tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual. Penentuan *discretionary accruals* dengan maksud untuk menaikkan atau menurunkan laba merupakan tindakan Manajemen Laba (*Earnings Management*). Dampak negatif yang timbul dalam pengelolaan manajemen laba yang kurang baik yaitu berkurangnya kredibilitas dan validitas informasi keuangan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Untuk mencegah Manajemen Laba yang berlebihan, penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan. Dengan adanya *Good Corporate Governance (GCG)*, membantu pengguna informasi keuangan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari pelanggaran (*fraud*). Dampak dari *good corporate governance* ini dapat dilihat dengan pembentukan Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Sekretaris Dewan Komisaris pada perusahaan-perusahaan publik, terutama yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Efektivitas komite audit dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh komite audit. Karakteristik tersebut antara lain ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit. Hal ini didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan ini secara jelas disebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Praktik *good corporate governance* menunjukkan bahwa pembentukan komite audit sebagai sebuah titik pusat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menegaskan bahwa adanya komite audit, sangat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Komite audit bekerja untuk membantu dewan komisaris meninjau laporan keuangan perusahaan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang disajikan memiliki kualitas yang tinggi serta terhindar dari konflik kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan sendiri, salah satunya melalui tindakan manajemen laba.

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Jumlah komite audit memiliki kaitan erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan dalam perusahaan. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.05/2013 poin 2 menyatakan bahwa “anggota komite audit paling sedikit terdiri dari komisaris independen yang berkedudukan sebagai ketua dan satu orang pihak Eksternal. Jumlah anggota komite audit dari pihak Eksternal paling sedikit separuh dari

jumlah anggota komite audit”. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit yaitu paling kurang 3 orang. Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan perusahaan.

Komite Audit Independen merupakan anggota komite audit yang bukan merupakan pihak berelasi. Independensi komite audit ditunjukkan dengan anggota komite audit dari pihak luar atau tidak memiliki hubungan dengan perusahaan atau konflik kepentingan. Dalam keputusan ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2012 poin (3) menyebutkan bahwa “Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit”. Peneliti menyimpulkan bahwa anggota komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dikatakan independen karena di dalam anggota komite audit tersebut diperankan oleh sekurang-kurangnya satu orang dari komisaris independen dan yang lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Independensi komite audit diukur menggunakan skala rasio. Semakin tinggi independensi komite audit maka kualitas palaporan keuangan semakin baik sehingga tindakan manajemen untuk mengutamakan kepentingan manajemen semakin rendah.

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun. Dalam peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 menyebutkan bahwa “komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”.

rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pertemuan komite audit yaitu paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan komite audit diukur dengan menggunakan rasio, yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam periode satu tahun. Semakin sering diadakan rapat pertemuan komite audit, maka semakin efektif komite audit mengendalikan manajemen, sehingga tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya.

Penelitian mengenai kualitas komite audit telah banyak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu telah berhasil membuktikan keterkaitan antara karakteristik komite audit dengan praktik manajemen laba. Katharina & Tambunan (2022) tentang pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Prastiti & Meiranto (2013) tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sementara karakteristik lain (frekuensi pertemuan dewan komisaris, keahlian keuangan dewan komisaris, ukuran komite audit, dan keahlian keuangan komite audit) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel ukuran perusahaan

dan *leverage* sebagai variabel kontrol terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Permanasari (2016) tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap praktik manajemen laba menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit dapat mempengaruhi praktik manajemen laba, sementara ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan atau rapat komite audit tidak mempengaruhi praktik manajemen laba. Hal tersebut di dukung juga oleh penelitian Trihartati & Pamudji (2010) yang menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. hasil penelitian ini menyatakan bahwa independensi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya *research gap* yaitu adanya perbedaan pendapat dari hasil analisis setiap penelitian sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan berusaha mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian ini masih yang terbaru yaitu periode 2019-2021 pada perusahaan manufaktur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Maka peneliti mengambil penelitian dengan judul : “PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi karena keterbatasan waktu dan pengalaman dari peneliti. Pada penelitian ini berfokus pada ukuran komite audit yang diukur menggunakan skala rasio dengan menghitung jumlah komite audit, independensi komite audit yang diukur menggunakan skala rasio dengan menghitung jumlah anggota komite audit independen dibagi jumlah anggota komite audit dengan menggunakan skala rasio dan frekuensi pertemuan komite audit diukur menggunakan skala rasio dengan menghitung jumlah pertemuan anggota komite audit dalam satu tahun sedangkan manajemen laba diukur menggunakan skala rasio dengan pendekatan *discretionary accrual* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan untuk mengembangkan konsep terkait hal-hal yang mempengaruhi manajemen laba.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh karakteristik yang ada pada komite audit yang dapat mempengaruhi manajemen laba.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba.

3. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat dalam memahami karakteristik komite audit terhadap praktik manajemen laba.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dirumuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika lebih dari satu orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Teori hubungan keagenan menghendaki adanya delegasi wewenang (secara keseluruhan atau sebagian) dari *principal* kepada *agen*. *Principal* melakukan monitoring terhadap kinerja *agen* melalui pertanggungjawaban (*accountability*).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi internal perusahaan serta prospek masa depan dari pada pemilik (pemegang saham). Manajer wajib memberitahukan keadaan perusahaan kepada pemilik. Sinyal ini dapat diberikan dengan pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat memicu timbulnya asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya asimetri antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat memberikan peluang bagi manajer melakukan manajemen laba untuk mengelabui pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja keuangan perusahaan.

Terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat mengakibatkan perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Menurut

teori keagenan, konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme kontrol yang tepat untuk mengkoordinasikan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan. Mekanisme kontrol yang tercakup dalam teori keagenan dapat diimplementasikan dengan mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* yang baik memberikan kepercayaan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* juga diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah atau mengurangi biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 Good Corporate Governance

Prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan di Indonesia yaitu *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance* adalah struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis mengenai peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Ardin & Merry, 2020). *Corporate Governance* juga mencakup aturan dan prosedur yang harus diperhatikan oleh direksi dan dewan pengurus ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, struktur *corporate governance* membuat pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, yaitu termasuk dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang terkait sebagai pemangku kepentingan.

Untuk mencegah terjadinya tindakan Manajemen Laba yang berlebihan, penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan. Dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat membantu para pengguna informasi keuangan untuk lebih yakin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari pelanggaran

(*fraud*). Struktur *Corporate Governance* yang baik dapat mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.

2.1.3 Komite Audit

Komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu: “Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang berperan membantu auditor dalam menjaga independensinya dari manajemen.”

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern perusahaan dan mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Prinsip independensi sangat difokuskan terutama dalam hal menjaga kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Pentingnya independensi pada komite audit ditegaskan oleh Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diringkas sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultasi Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan emiten.
5. Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain.

Selain itu, melalui keputusan tersebut BAPEPAM juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 3 anggota, dimana minimal satu orang merupakan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. BAPEPAM juga menghimbau bahwa setidaknya-tidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa: “Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya”. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit menurut Effendi (2002) dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif yaitu:

1. Pelaporan Keuangan

Meksipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3. *Corporate Governance*

Meksipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan *corporate governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan publik dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 bagi BUMN. Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang

independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas.

Tugas dan tanggung jawab komite audit juga dipertegas melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyebutkan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Adapun karakteristik Komite Audit dan hubungannya dengan manajemen laba (Dewi Indriasih, 2020) yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit.

Jumlah anggota komite audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa

banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Bab II pasal (4) menyebutkan bahwa: “Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik”. Komite audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggungjawab pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen puncak.

Dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen. Selain dapat meningkatkan fungsi pengawasan, ukuran komite audit yang besar juga akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan semakin lebih terjamin. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Ukuran Komite Audit dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{ACSIZE} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

2. Independensi Komite Audit

Komite audit independen diperlukan dalam monitoring manajemen laba. Peran monitoring akan semakin kuat dengan keterlibatan auditor yang berkualitas. Komite audit independen adalah jumlah komite audit yang independen dalam suatu perusahaan. Dalam keputusan ketua

Bapepam No. Kep-29/PM/2004, dinyatakan bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Anggota komite audit independen adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Independensi Komite Audit diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Karakteristik komite audit berikutnya adalah frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh komite audit. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (2015) menyebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingan sendiri. Semakin tinggi tingkat frekuensi pertemuan dapat meminimalisasi manajemen laba. Frekuensi Komite Audit diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ACMEET = \text{Jumlah Pertemuan Anggota Komite Audit dalam 1 Tahun}$$

2.1.4 Manajemen Laba

Secara singkat Scott (2015) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai pelaporan keuangan yang tidak netral yang di dalamnya manajer dapat melakukan campur tangan untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi.

Manajemen laba atau yang sering disebut dengan *earning management* adalah tindakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. *Earning*

management merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.

Ada 2 perspektif penting yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer, yaitu perspektif informasi dan oportunistik. Kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab akibat yang mendorong terjadinya Manajemen Laba. Artinya, Manajemen Laba sebenarnya merupakan upaya oportunistik seseorang untuk mempengaruhi informasi yang disajikannya dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain mengenai informasi yang sebenarnya. Upaya mempengaruhi informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan, dan mengubah berbagai metode dan prosedur akuntansi yang ada.

Manajemen Laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi (*Accounting games*). Apalagi, jika melihat bahwa rekayasa ini merupakan upaya untuk menyembunyikan dan mengubah informasi dengan mempermainkan besar kecilnya angka-angka komponen laporan keuangan yang dilakukan ketika mencatat dan menyusun informasi itu. Ada 2 alasan yang dapat menjelaskan mengapa laporan keuangan rawan untuk dipermainkan oleh siapapun yang menyusun informasi itu. Alasan pertama adalah, hanya dengan memahami dan menguasai konsep-konsep akuntansi dan keuangan seseorang dapat mempermainkan informasi keuangan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Alasan kedua adalah, kebebasan dalam memilih dan menggunakan metode dan prosedur akuntansi ini secara tidak langsung membuat Standar

Akuntansi seakan-akan mengakomodasi atau memfasilitasi aktivitas rekayasa manjerial ini.

Menurut Sulistyanto, terdapat beberapa alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba. Beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan *earning management* atau manajemen laba, antara lain sebagai berikut:

1. Motivasi Pasar Modal

Faktor yang mempengaruhi studi pasar modal adalah perkembangan pasar modal itu sendiri. Perkembangan pasar modal ini sebenarnya merupakan dampak dari perubahan orientasi dunia usaha. Saat ini, dunia usaha telah mengalami perubahan orientasi dalam mencari dana. Dunia usaha tidak lagi menggantungkan diri pada perbankan atau lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan dan operasional dan investasi, namun lebih menyukai dana yang diperoleh dari pasar modal.

2. Penawaran Saham Perdana

Penawaran saham perdana atau (IPO) merupakan penawaran saham suatu perusahaan private untuk pertama kalinya kepada publik. Hal inilah yang membuat pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas dalam perusahaan. Artinya, pemilik dapat menikmati seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan seorang diri sekaligus harus menanggung resiko yang kemungkinan muncul.

3. Motivasi Kontraktual

Profesionalisme pengelolaan perusahaan akan muncul seandainya setiap pihak menjalankan perannya masing-masing tanpa mengintervensi kepentingan pihak lain. Sebaliknya, permasalahan agensi akan muncul seandainya ada pihak yang mendahulukan kepentingan pribadi dengan mengintervensi kepentingan pihak lain. Permasalahan inilah yang memicu konflik kepentingan antar manajer dan pemilik perusahaan.

4. Motivasi Regulasi

Dalam konteks hubungan agensi antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang ditentukan dengan menggunakan laba sebagai dasar perhitungannya. Sebaliknya, pemerintah mempunyai hak untuk menerima pembayaran pajak perusahaan itu. Sedangkan hak yang akan diterima perusahaan berupa rasa aman dan pelayanan publik dalam menjalankan usahanya.

Di samping itu, manajemen laba khususnya dalam pola perataan laba juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan informasi privat (*private information*) perusahaan. Manajemen laba juga dapat dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu yang lain, misalnya dalam rangka mendapatkan bonus berbasis laba, menghindari pelanggaran kontrak utang, dan menghindari biaya politis (*political cost*) pada waktu perusahaan mendapatkan laba yang tinggi.

Manajemen laba diukur dengan *discretionary accruals* menggunakan *Modified Jones Model*. Jones mengembangkan model *earning management* dengan membagi total akrual perusahaan dengan tingkat akrual yang abnormal

atau (*Discretionary Accrual*). *Discretionary Accrual* adalah bentuk kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh pihak manajemen untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi. *Discretionary Accrual* merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, dimana cara tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual.

Manajemen Laba dapat terjadi karena penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar akrual. Sistem akuntansi akrual sebagaimana yang ada pada prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan kesempatan kepada manajer untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan memberi pengaruh kepada pendapatan yang dilaporkan. Dalam hal ini pendapatan dapat dimanipulasi melalui *discretionary accruals*.

Pengukuran Manajemen Laba dilakukan dengan menggunakan Pendekatan *Discretionary Accrual* (DA). Penggunaan pendekatan *Discretionary Accrual* (DA) sebagai alat ukur Manajemen Laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model*. Menghitung *Discretionary Accrual* (DA) dapat dilakukan dengan persamaan berikut:

it ———

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan, maka diperlukan penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa hasil dari penelitian terdahulu, yang disajikan dalam tabel:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti/Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|
| 1. | Katharina & Tambunan, (2022)/ Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020) | Dependen: Manajemen Laba Independen: Ukuran audit, independensi komite audit dan kualitas audit. | Ukuran komite, independensi komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. |
| 2. | Widiastuty (2016)/ Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba | Dependen: Manajemen Laba Independen: Independensi komite audit, ukuran komite audit, <i>financial expertise</i> dan jumlah pertemuan komite audit | Hasil uji F menunjukkan bahwa variable independensi komite audit, <i>financial expertise</i> dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variable independen yaitu independensi dan jumlah pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | Permanasari (2016)/ Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Yang Listed Di BEI Tahun 2011-2013) | Dependen: Praktik Manajemen Laba Independen: Independensi komite audit, ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit | Independensi komite audit dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Sedangkan ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. |
| 4. | Prastiti & Meiranto (2013)/ Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba | Dependen: Manajemen Laba Independen: Ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, keahlian keuangan dewan komisaris dan frekuensi pertemuan dewan komisaris | Ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan karakteristik- karakteristik lain tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 5. | Oktaviani (2015)/ Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di BEI | Dependen: Manajemen Laba Independen: Ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi | Ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. |

Sumber: Berdasarkan referensi dari berbagai jurnal

Sejalan dengan penelitian terdahulu di atas, penulis menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2016) sebagai acuan dalam penelitian ini.

Penulis ingin menguji kembali variabel yang berpengaruh signifikan atau tidak terhadap manajemen laba dengan periode tahun yang berbeda yaitu 2019-2021.

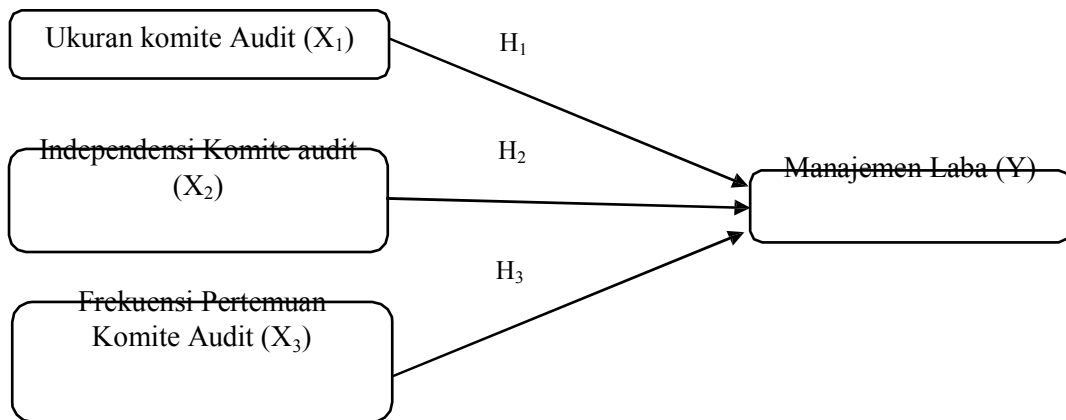
2.3 Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Rerangka Teoritis

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Dalam pembentukan kerangka berpikir, peneliti menggunakan model Analisis Regresi Berganda. Analisis ini merupakan analisis linear yang digunakan dengan jumlah variabel independen lebih dari 2 (dua) variabel.

Variabel Independen pada penelitian ini adalah Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit, sedangkan variabel Dependen adalah Manajemen Laba. Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel-variabel yang telah dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai

berikut:



Gambar 2.1 Rerangka Teoritis

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran Komite Audit

Didalam keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 poin (2) menyebutkan bahwa “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik”. Dengan semakin besarnya ukuran komite audit, maka akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen.

Menurut Prastiti & Meiranto, (2013) dalam penelitiannya, membuktikan bahwa ukuran komite audit, berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H1: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2. Independensi Komite Audit

Syarat utama anggota Komite Audit adalah Independensi Komite Audit. Anggota Komite Audit Independen adalah anggota dari pihak Independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan termasuk Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dengan demikian banyaknya anggota komite audit yang independen, kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

(Permanasari, 2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara independensi komite audit dengan manajemen laba. Karena semakin independen anggota Komite Audit tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh perusahaan lebih dapat dipercaya. Independensi yang dimiliki oleh komite audit dapat meminimalisasi adanya manajemen laba.

H2: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Karakteristik komite audit berikutnya adalah jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit. Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri.

Jumlah pertemuan komite audit ini diuji pada beberapa penelitian sebelumnya karena komite audit yang kurang aktif akan mengurangi pengawasan terhadap manajemen. Sharma (2009) membuktikan bahwa

perusahaan yang memiliki komite audit dengan tingkat frekuensi pertemuan yang kecil akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang kurang berkualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba.

H3: Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019-2021. Jumlah populasi adalah 38 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

Tabel 3.1 Nama-nama Populasi Penelitian

| NO | KODE | NAMA PERUSAHAAN |
|----|------|---------------------------------|
| 1 | ADES | Akasha Wira International Tbk |
| 2 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
| 3 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk |
| 4 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
| 5 | BUDI | Budi Starch Sweetener Tbk |
| 6 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk |
| 7 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk |
| 8 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk |
| 9 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk |
| 10 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk |
| 11 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 12 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk |
| 13 | ENZO | Moreno Abadi Perkasa Tbk |
| 14 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk |
| 15 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
| 16 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk |
| 17 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 18 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
| 19 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk |
| 20 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 21 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk |
| 22 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk |

| | | |
|----|------|--|
| 23 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk |
| 24 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 25 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 26 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk |
| 27 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk |
| 28 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk |
| 29 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 30 | PSGO | Palma Serasih Tbk |
| 31 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
| 32 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
| 33 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 34 | STTP | Siantar Top Tbk |
| 35 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk |
| 36 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk |
| 37 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk |
| 38 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk |

3.1.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono: “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* (pemilihan sampel berdasarkan tujuan). Metode *purposive sampling* merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan sebagai upaya peneliti untuk menetapkan bagian dari populasi.

Kriteria-kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021
2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memperoleh laba secara stabil periode 2019-2021

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dan dinyatakan kedalam rupiah selama periode 2019-2021

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

| No | Nama Perusahaan | Kriteria | | | Sampel |
|----|--|----------|---|---|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Akasha Wira International Tbk | | | | 1 |
| 2 | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | | | | |
| 3 | Tri Banyan Tirta Tbk | | | | |
| 4 | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | | | | |
| 5 | Budi Starch Sweetener Tbk | | | | |
| 6 | Campina Ice Cream Industry Tbk | | | | 2 |
| 7 | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | | | | |
| 8 | Sariguna Primatirta Tbk | | | | 3 |
| 9 | Cisarua Mountain Dairy Tbk | | | | |
| 10 | Wahana Interfood Nusantara Tbk | | | | 4 |
| 11 | Delta Djakarta Tbk | | | | 5 |
| 12 | Diamond Food Indonesia Tbk | | | | 6 |
| 13 | Morenzo Abadi Perkasa Tbk | | | | |
| 14 | Sentra Food Indonesia Tbk | | | | |
| 15 | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | | | | 7 |
| 16 | Buyung Poetra Sembada Tbk | | | | 8 |
| 17 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | | | | 9 |
| 18 | Inti Agri Resources Tbk | | | | |
| 19 | Era Mandiri Cemerlang Tbk | | | | |
| 20 | Indofood Sukses Makmur Tbk | | | | 10 |
| 21 | Indo Pureco Pratama Tbk | | | | |
| 22 | Mulia Boga Raya Tbk | | | | |
| 23 | Magna Investama Mandiri Tbk | | | | |
| 24 | Multi Bintang Indonesia Tbk | | | | |
| 25 | Mayora Indah Tbk | | | | 11 |
| 26 | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk | | | | 12 |
| 27 | Prima Cakrawala Abadi Tbk | | | | |
| 28 | Panca Mitra Multiperdana Tbk | | | | |
| 29 | Prasidha Aneka Niaga Tbk | | | | |
| 30 | Palma Serasih Tbk | | | | |
| 31 | Nippon Indosari Corpindo Tbk | | | | 13 |
| 32 | Sekar Bumi Tbk | | | | |
| 33 | Sekar Laut Tbk | | | | 14 |
| 34 | Siantar Top Tbk | | | | 15 |
| 35 | Jaya Swarasa Agung Tbk | | | | |
| 36 | Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk | | | | 16 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|--|
| 37 | Widodo Makmur Perkasa Tbk | | | | |
| 38 | Widodo Makmur Unggas Tbk | | | | |

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka terdapat 16 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria. Sehingga penelitian ini menggunakan 48 sampel dan sudah memenuhi kriteria sampel untuk melakukan penelitian.

Tabel 3.3 Sampel Penelitian yang terpilih

| NO | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan |
|-----------|------------------------|--|
| 1 | ADES | Akasha Wira International Tbk |
| 2 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk |
| 3 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk |
| 4 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk |
| 5 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 6 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk |
| 7 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
| 8 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk |
| 9 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 10 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 11 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 12 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk |
| 13 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
| 14 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 15 | STTP | Siantar Top Tbk |
| 16 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk |

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber yang tersedia tidak harus dikumpulkan oleh peneliti. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa “data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data penelitian ini bersumber dari publikasi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dapat diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. (www.idx.co.id)

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data atau menghimpun informasi kemudian mempelajari informasi tersebut berupa laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dengan mengunduh data laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021, serta studi pustaka dan penelitian terdahulu untuk mendapatkan teori-teori yang melatarbelakangi penelitian.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa “definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Pengukuran manajemen laba dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Discretionary Accruals (DA)*. Penggunaan pendekatan *Discretionary Accrual* sebagai alat ukur manajemen laba di hitung menggunakan *Modified Jones Model*. Untuk mendapatkan nilai *Discretionary accrual* dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menghitung nilai *Total Accrual (TAC)*
- b) Nilai *Total Accrual (TAC)* yang di estimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary least Square*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{---} = \text{---} - \text{---} + \text{---}$$

- c) Menghitung nilai *Nondiscretionary Accruals (NDA)* :

$$\text{---} - \text{---} + \text{---}$$

- d) Menghitung *Discretionary Accrual (DA)* dengan persamaan berikut :

$$\text{---}$$

Keterangan :

=Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada periode t

=Arus kas operasi perusahaan i pada periode t

=Total *Accrual* Perusahaan i pada periode t

=Total Aset Perusahaan i pada periode t

=Perubahan pendapatan perusahaan i antar periode dan periode t-1

=*Nondiscretionary Accruals* Perusahaan i pada periode t

=Perubahan piutang perusahaan i antar periode t dengan periode t-1

=Nilai aset tetap perusahaan i dengan periode t

=*Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t

3.3.2 Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel bebas yaitu :

a) Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan menggunakan indikator ukuran komite audit (jumlah absolut) yang diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan perusahaan tersebut. Di dalam keputusan ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 poin (2) menyebutkan bahwa “Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik”. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Ukuran komite audit dapat dihitung dengan rumus berikut:

ACSIZE = Jumlah Komite Audit

b) Independensi Komite Audit

Independensi komite audit dilihat dari seberapa banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak luar atau tidak memiliki hubungan atau benturan kepentingan dengan pihak perusahaan. Independensi komite audit diukur dengan menggunakan Skala Rasio dengan metode analisis linear berganda.

c) Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Dalam POJK NO.55/POJK.04/2015 menyebutkan bahwa “Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun. Frekuensi Komite Audit diukur dengan skala rasio yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam periode satu tahun.

ACMEET = Jumlah pertemuan anggota komite audit dalam satu tahun

Tabel 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

| No | Variabel | Definisi | Pengukuran | Skala |
|----|----------------------------------|---|--|-------|
| 1. | Manajemen Laba | Manajemen laba merupakan suatu tindakan campur tangan dari pihak manajemen dalam penyusunan dan pelaporan keuangan untuk mencapai tingkat laba tertentu | ———— | Rasio |
| 2. | Ukuran Komite Audit | Jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan | ACSIZE = Jumlah Komite Audit | Rasio |
| 3. | Independensi Komite Audit | Anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan | ACINDP = Jumlah anggota komite audit independen/ jumlah anggota komite audit | Rasio |
| 4. | Frekuensi Pertemuan Komite Audit | Jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun | ACMEET = Jumlah pertemuan anggota komite audit dalam satu tahun | Rasio |

3.4 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data yang telah terkumpul agar dapat memberikan tafsiran jawaban atas hipotesis yang telah ditetapkan pada penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linear Berganda, dengan menggunakan software *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 25*. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan alat uji sebagai berikut:

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang berfungsi untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian serta dapat menunjukkan nilai maksimum (max), nilai minimum (min), dan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atas hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dimana dengan menggunakan uji asumsi klasik dapat diketahui sejauh mana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat keakuratannya.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya masalah terhadap pengujian ini dapat dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Regresi yang terbebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual data sama disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan bahwa variabel pada suatu observasi tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada observasi lainnya. Ghazali, (2018), Autokorelasi mengujinya ada korelasi kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Analisis regresi bertujuan untuk meramalkan suatu nilai variabel dependen dengan adanya perubahan dari variabel independen. Model yang digunakan dalam regresi berganda untuk melihat pengaruh Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan komite Audit terhadap Manajemen Laba dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

Y = Manajemen Laba

= Konstanta

= Koefisien Regresi

- X1 = Ukuran Komite Audit
X2 = Independensi Komite Audit
X3 = Frekuensi Pertemuan Komite Audit
e = Standar Error

3.4.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika koefisien regresi signifikansi pada t -signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. sebaliknya, t -signifikan $> 0,05$ atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan model regresi dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Nilai koefisien determinasi antara nol dan 1.